

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai sarana peningkatan mutu sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli terhadap pendidikan, yang dapat digambarkan dari pencapaian pendidikan dari warga negaranya. Namun, tidak semua bangsa dapat memfasilitasi program pendidikan dengan pembiayaan yang memadai. Kalau pendidikan dipandang sebagai sebuah kereta, maka biaya dipandang sebagai kuda yang akan menarik kereta tadi. Jadi kalau kuda (biaya) kuat, kereta (pendidikan) akan berjalan dengan baik, tetapi banyak pendidikan yang lemah karena faktor biaya kurang.

Instrumen akreditasi standar pembiayaan diantaranya menjelaskan bahwa (1) sekolah/ madrasah memiliki RAK untuk investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir; (2) sekolah/madrasah memiliki dokumen RAK untuk biaya operasi non personalia 3 (tiga) tahun terakhir; (3) dokumen investasi sarana adalah catatan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah- pindah. Sedangkan dokumen prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ madrasah (lahan dan gedung). Kedua dokumen tersebut dibuat setiap tahun untuk mengetahui nilai investasi sarana dan prasarana; (4) biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: biaya pendidik lanjut, pelatihan, seminar dan lain- lain termasuk yang dibiayai oleh pemerintah/ pemerintah daerah, yayasan, maupun lembaga lain; (5)

modal kerja adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan agar terlaksana proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (6) gaji adalah penghasilan rutin setiap bulan; (7) biaya alat tulis sekolah adalah biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, dan lain- lain; (8) bahan habis pakai sekolah/madrasah misalnya: pengadaan bahan- bahan praktikum, tinta, bahan kebersihan, dan sebagainya; (9) biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/ madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar; (10) biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/ madrasah seperti listrik, telepon, air dan lain- lain.¹

Menurut Departemen Pendidikan Nasional manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah². Namun sayangnya, masalah- masalah dalam manajemen keuangan pasti ada saja. Misalnya seperti pengawasan terhadap pembiayaan sekolah yang kurang optimal dan minimnya tenaga yang paham dan ahli dalam mengelola manajemen pembiayaan. Padahal tingkat kesensitivitasan manajemen

¹ Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi SMA/MA -2017 BAN-S/M. 57-59.Pdf

²Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

keuangan sangat tinggi dalam mengelolanya pun diperlukan tenaga yang paham dan ahli mengelola keuangan.³

Hal itu terungkap berdasarkan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap tren penyidikan kasus korupsi sektor pendidikan selama tahun 2006 sampai 2016. Dilihat dari data- data yang ada pendidikan Indonesia selama satu dekade terakhir dari 2006 sampai 2016, terdapat total 425 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kasus tersebut memberikan kerugian negara dengan nilai suap mencapai Rp 1,3 triliun dan Rp 55 miliar. Adapun jumlah tersangka terkait seluruh kasus mencapai 618 orang.⁴

Berbeda masalah yang ada di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang Menurut Wirni Artini, sumber keuangan yang didapatkan SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang hanya dari BOS dan BOSDA itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah sehingga sekolah harus memangkas kegiatan.⁵

Dengan demikian pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan.⁶ Dan pentingnya manajemen pembiayaan karena untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan

³Windi Aprilianti, “*Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Kelas IX Di SMP Islam Raudatul Hikmah Pamulang*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 1.

⁴Windi Aprilianti, “*Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Kelas IX Di SMP Islam Raudatul Hikmah Pamulang*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 2.

⁵Wawancara Dengan Bendahara BOS Wirni Artini Pada Hari Senin, 24 September 2018.

⁶Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), 5.

keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.⁷

Bagi mayoritas masyarakat, pendidikan di sekolah sangat penting karena merupakan bagian dari investasi pembangunan bangsa.⁸ Untuk menunjang proses pendidikan serta berjalannya proses belajar mengajar dengan baik dan menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi guru maupun murid, maka diperlukan mutu sarana prasarana yang memadai.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 ayat 1 dijelaskan:”setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.⁹

Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pendidikan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan, maka keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diabaikan, melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di suatu lembaga pendidikan. Apalagi di era teknologi ini, di mana

⁷ Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

⁸E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 50.

⁹Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

setiap pendidikan dihadapkan pada kemampuan menghadirkan sarana dan prasarana yang update, sesuai tuntutan zaman.¹⁰

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini, Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.¹¹

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) pasal 1 berbunyi “ standar sarana prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana”.¹²

Menurut Hadi Sumarga, sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang masih jauh dengan apa yang diharapkan, misalnya sekolah belum mempunyai ruang laboratorium bahasa, ruang bimbingan konseling,

¹⁰Dian Amaliyani, “ *Pengaruh Manajemen Sarana Dan Prasarana Terhadap Pencapaian Akreditasi A Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar*”, Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), 3

¹¹Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 47- 48.

¹²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana

gudang, dan masih kekurangan jamban. Sekolah hanya mempunyai 9 ruang jamban yang berfungsi itu tidak sesuai dengan jumlah murid yang ada di sekolah.¹³

Masalah- masalah yang telah dipaparkan, sangat mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus pada **“Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Mutu Sarana Prasarana Pada SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pembiayaan sekolah yang kurang optimal
2. Minimnya tenaga kependidikan yang paham dan ahli dalam mengelola manajemen pembiayaan
3. Sumber keuangan sekolah yang kurang
4. Sarana prasarana sekolah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada peneruh manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana pada SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang.

¹³Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Hadi Sumarga Pada Hari Senin, 24 September 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana manajemen pembiayaan di SMA N 1 Ciomas Kabupaten Serang?
2. Bagaimana mutu sarana prasarana sekolah di SMA N 1 Ciomas Kabupaten Serang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara manajemen pembiayaan dengan mutu sarana prasarana SMAN 1 Ciomas Kabupaten Serang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan manajemen pembiayaan di SMA N 1 Ciomas Kabupaten Serang
2. Mendeskripsikan mutu sarana prasarana di SMA N 1 Ciomas Kabupaten Serang
3. Menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana SMAN 1 Ciomas Kabupaten Serang

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi guna penelitian lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan dan mutu sarana prasarana sekolah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat kepada:

- a) Bagi sekolah, terutama bagian manajemen pembiayaan. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan dalam peningkatan mutu sarana prasarana sekolah.
- b) Bagi siswa, dapat digunakan sebagai landasan untuk lebih meningkatkan prestasi belajar baik dibidang akademik maupun non akademik.
- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi lebih lanjut mengenai sekolah yang bersangkutan.
- d) Bagi peneliti lain, diharapkan menjadi bahan tambahan referensi guna penelitian lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan dan mutu sarana prasarana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA terdiri atas kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN terdiri atas: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri atas, deskripsi data, pengajuan persyaratan analisis normalitas, pengajuan hipotesis dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP terdiri atas: kesimpulan dan saran